

## BAB II

### DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN

#### 2.1 Gambaran Umum Provinsi Riau

Gambaran umum dan kondisi daerah di Provinsi tercermin dari beberapa aspek yang meliputi geomorfologi, demografi, ekonomi dan sumberdaya alam, sosial budaya dan politik, prasarana dan sarana, wilayah dan tata ruang, serta pemerintahan.

##### 2.1.1 Geomorfologi dan Lingkungan Hidup

Gambar 2.1

Peta Administrasi Provinsi Riau



Sumber: DILHK, 2017

Provinsi Riau serta geografis terletak pada posisi  $01005'00''$  Lintang Selatan  $-02025'00''$  Lintang Utara dan  $100000'00'' - 105005'00$  Bujur Timur. Provinsi Riau setelah dimekarkan tercatat  $107.932,71 \text{ km}^2$ ,

dimana 80,11% diantaranya merupakan wilayah daratan sedangkan 19,89% diantaranya lautan/perairan. Menurut kondisi geomorfologinya daratan Riau dapat dibedakan antara wilayah bagian Timur yang didominasi oleh dataran rendah dengan ketinggian antara 0-10 meter, wilayah bagian Tengah merupakan dataran bergelombang dan wilayah bagian Barat merupakan dataran berbukit yang dibentuk oleh gugusan Bukit Barisan (RPJP Provinsi Riau, 2005-2020).

Tabel 2.1  
Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan di Provinsi Riau Menurut Kabupaten/Kota, 2015

No	Kabupaten/Kota	Ibu kota Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa/Kelurahan
1	Kuantan Singingi	Teluk Kuantan	15	229
2	Indragiri Hulu	Rengat	14	194
3	Indragiri Hilir	Tembilahan	20	236
4	Pelalawan	Pangkalan Kerinci	12	118
5	Siak	Siak	14	131
6	Kampar	Bangkinang	21	245
7	Rokan Hulu	Pasir Pangarayan	16	153
8	Bengkalis	Bengkalis	8	155
9	Rokan Hilir	Bagan Siapi-Api	18	193
10	Kepulauan meranti	Selat Panjang	9	101
11	Pekanbaru	Pekanbaru	12	58
12	Dumai	Dumai	7	33
13	Jumlah		166	1846

Sumber: BPS Provisini Riau, 2017 dalam Riau Angka 2016

Provinsi Riau memiliki luas 107.932,71 km<sup>2</sup> atau setara dengan 10.793.271 hektar. Luas daratan sebesar 9.036.710 hektar dan sisanya

berupa lautan/perairan seluas 1.756561 hektar. Secara geografis Provinsi Riau terletak pada posisi 01005'00" Lintang Selatan- 02025'00" Lintang Utara dan antara 100000'00" Bujur Timur hingga 105005'00" Bujur Timur. Peta Provinsi Riau beserta Kabupaten/Kota (RPJMD Provinsi Riau, 2014-2019).

Kondisi geomorfologi tersebut menetapkan wilayah Riau bagian Timur berfungsi sebagai kawasan bawahan dari wilayah bagian Barat yang merupakan hulu dari 15 sungai yang mengalir di Provinsi Riau yang bermuara di pantai Timur, 4 sungai diantaranya memiliki arti penting sebagai prasarana perhubungan, yakni sungai Siak dengan panjang +300 Km dan kedalaman 8-12 meter, Sungai Rokan sepanjang +400 Km dengan kedalaman 6- 8 meter, Sungai Kampar sepanjang 400 Km dengan kedalaman +6 meter, dan Sungai Indragiri sepanjang +500 Km dengan kedalaman 6-8 meter (RPJP Provinsi Riau, 2005-2020).

Wilayah Riau bagian Timur yang merupakan dataran rendah menjadi rentan terhadap bencana banjir dan genangan sebagaimana yang selama ini berlangsung secara berkala. Kawasan di bagian Timur sebagian besar merupakan lahan gambut yang berbentuk oleh penimbunan bahan organik pada lahan yang cenderung tergenang dengan luas sekitar 4,8 juta Ha, terdiri dari rawa gambut air tawar dan rawa gambut pasang-surut. Walaupun lahan gambut bersifat miskin unsur hara esensial, namun memiliki kemampuan untuk menyimpan dan mengatur aliran air permukaan. Penurunan luas lahan gambut di kawasan bagian Timur

merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang harus diatasi, terutama untuk mempertahankan fungsinya sebagai kawasan retensi air (RPJP Provinsi Riau, 2005-2020).

Luas wilayah daratan Provinsi Riau adalah 9.036.710 hektar. Berdasarkan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGKH) terbaru (Keputusan Menteri Kehutanan No.173/Menhut-1111986) dengan penggunaan sebagai berikut : (1) Hutan Suaka Alam/Hutan Wisata seluas 531.852.65 Hektar atau 6,1%; (2) Hutan Lindung seluas 228.793,82 Hektar atau 2,6%; (3.a) Hutan Produksi Tetap seluas 1.605.762.78 Hektar atau 18,6%; (3b) Hutan Produksi Terbatas seluas 18.15.949,74 Hektar atau 21,12%; (4) Hutan Produksi yang dapat dikonversi seluas 2.364.828,39 Hektar atau seluas 27,50%; (5) Hutan Mangrove/Bakau seluas 138.433,62 Hektar atau 1,6%; dan (6) Areal Penggunaan Lain/APL Pelepasan seluas 1.913.136 Hektar atau 22,25% (RPJP Provinsi Riau, 2005-2020).

Tabel 2.2  
Luas Lahan Menurut Jenis dan Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/Kota	Jenis Lahan Land Type			Total
		Lahan Basah	Lahan Kering	Perairan	
1	Kuantan Singingi	519527,33	3 961,58	4 383,57	527872,48
2	Indragiri Hulu	740438,88	17 329,56	5 276,49	763044,93
3	Indragiri Hilir	1321623,13	33 457,53	436 296,55	1791377,21
4	Pelalawan	1276060,03	6 121,43	110 312,83	1392494,29
5	Siak	790672,67	28 590,12	9 216,27	828479,06
6	Kampar	1061113,49	16 219,90	18 173,10	1095506,49

7	Rokan Hulu	713577,78	5 642,66	5 630,50	724850,94
8	Bengkalis	809682,36	23 379,26	677 472,44	1510534,06
9	Rokan Hilir	880433,30	5 675,10	542 879,88	1428988,28
10	Kepulauan Meranti	355555,82	4 073,79	284 726,90	644356,51
11	Pekanbaru	34494,02	28 542,54	756,51	63793,07
12	Dumai	204234,09	6 756,09	371,50	211361,68
<b>Provinsi Riau</b>		<b>8707412,90</b>	<b>179749,56</b>	<b>496,54</b>	<b>10982659,00</b>

Sumber: BPS Provinsi Riau, 2017 dalam Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau/ Representative Office of National Land Board of Riau Province, 2014

Menurut rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau 2013-2030 yang saat ini dalam tahap proses pengesahan, berdasarkan hasil rekomendasi tim terpadu terdiri atas: (1) Kawasan Hutan seluas 4.411.648 hektar atau 48.82%;(2) Areal penggunaan lain seluas 4.505.187 hektar (491, 8%); dan peralran/sungai seluas 119.260 hektar (1.32%) sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.7. Dari luas hutan usulan tim terpadu, seluas 3.986.475 hektar atau 441, 1% dari total luas daratanProvinsi Riaumerupakan luas hutan tetap (hutan lindung,hutan suaka alam/hutan pelestarian alam,hutan produksi terbatas dan hutan produksl tetap) dan seluas 425.173 hektar {18,06%) merupakan hutan produksi konversi (RPJMD Provinsi Riau, 2014-2019).

Kondisi geologi Riau didominasi oleh bantuan sedimen Kuarter dengan sisipan bantuan sedimen Tersier di bagian Barat dan Selatan.Struktur geologi memiliki lipatan yang umumnya berada di wilayah

Barat sepanjang Bukit Barisan, serta patahan aktif yang tersebar mulai dari bagian Barat sekitar Bukit Barisan hingga bagian Tengah dan Selatan, ditinjau dari potensi bencana alam geologi dan sebagian besar wilayah Provinsi Riau bagian Tengah dan Barat termasuk zona lipatan (*folded zone*). Kemungkinan terjadi gempa bumi di bagian Barat dipengaruhi oleh keaktifan volkanis di daerah Sumatera Barat. Sedang potensi gerakan tanah relative kecil karena wilayah Provinsi Riau umumnya datar, kecuali di sebagian wilayah Barat yang merupakan bagian dari Bukit Barisan (RPJP Provinsi Riau, 2005-2020).

Posisi geografis yang strategis dan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Provinsi Riau selain berpotensi meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, juga memberikan tantangan bagi pemerintahan Provinsi untuk memiliki lingkungan hidup yang lestari (RPJP Provinsi Riau, 2005-2020). Pada konteks tersebut, maka keberadaan instansi yang secara khusus membidangi lingkungan hidup; peran serta seluruh satuan kerja, masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan lingkungan serta tersedianya pranata dan perangkat pengaturan pengendalian kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan dapat menjadi modal utama dalam penyelenggaraan pembangunan yang berwawasan lingkungan di Provinsi Riau.

## 2.1.2 Demografi

Hasil Sensus Penduduk tahun 2000 mencatat jumlah penduduk Provinsi Riau tanpa Provinsi kepulauan Riau sebesar 3.755.485 jiwa dengan distribusi 56,7% tinggal di perkotaan dan 43,3% beriklim di pedesaan. Survei Sosial Ekonomi Nasional mencatat jumlah penduduk tahun 2005 meningkat menjadi 4.614.930 jiwa. Jumlah Penduduk Provinsi Riau pada tahun 2006 adalah 6.369.600 jiwa terdiri dari laki-laki dan perempuan juga dalam lima tahun terakhir, laju pertumbuhan penduduk setiap tahun cenderung stabil dengan rata-rata 4,01 persen per tahun yang sangat dipengaruhi oleh migrasi masuk. Jika rata-rata laju pertumbuhan penduduk tersebut tidak dapat dikurangi, maka pada tahun 2025, jumlah penduduk Provinsi akan menjadi sekitar 12 juta orang, atau bertambah sekitar 34 persen dari tahun 2006 (RPJP Provinsi Riau, 2005-2020).

Tabel 2.3  
Pertumbuhan Penduduk Kabupaten/Kota (Jiwa)

No	Kab/Kota	Penduduk Kabupaten/Kota (Jiwa)				
1	Kuantan Singingi	294468	302631	306718	310619	314276
2	Indragiri Hulu	372074	383814	392354	400901	409431
3	Indragiri Hilir	675898	676419	685530	694614	703734
4	Pelalawan	329539	339869	358210	377221	396990
5	Siak	391760	404093	416298	428499	440841
6	Kampar	711236	733506	753376	773171	793005
7	Rokan Hulu	507079	523024	545483	568576	592278

8	Bengkalis	503604	519389	527918	536138	543987
9	Rokan Hilir	574419	592403	609779	627233	644680
10	Kepulauan Meranti	177004	177587	178839	179894	181095
11	Pekanbaru	929247	958352	984674	1011467	1038118
12	Dumai	259913	268022	274089	280109	285967
Total		5726241	5879109	6033268	6188442	6344402

Sumber: BPS Provisisi Riau, 2017

Fenomena distribusi kependudukan menunjukkan bahwa pertambahan penduduk perkotaan meningkat lebih dari dua kali lipat penduduk perdesaan. Gejala tersebut selain disebabkan oleh perubahan kawasan perdesaan menjadi perkotaan secara fisik dan fungsional, juga memberikan indikasi bahwasanya kebijakan pembangunan selama itu lebih berorientasi pada kawasan perkotaan, disamping itu industrialisasi telah memacu pembangunan fasilitas secara fisik maupun non fisik pada beberapa kawasan yang mengubah rona fisik perdesaan menjadi perkotaan.

### **2.1.3. Ekonomi Dan Sumber Daya Alam**

Kondisi perekonomian Provinsi Riau dan kecendrungan perkembangannya pada dasarnya didukung oleh sumber daya alam (resources baseeconomy) yang dimiliki seperti perkebunan, kehutanan dan perikanan serta pertambangan dan energi. Dengan potensi sumber daya alam yang besar tersebut, maka pengelolaan yang efektif dan efisien akan



memperkokoh struktur perekonomian Provinsi Riau. Melihat laju PDRB sebagai Berikut:

Tabel 2.4

Laju Implisit PDRB Kab/Kota (Persen)

Kabupaten/Kota	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kuantan Singingi	4.91	3.74	2.05	6.38	7.18	5.15
Indragiri Hulu	12.11	3.36	2.38	7.10	5.53	3.27
Indragiri Hilir	13.02	2.80	2.58	7.98	6.14	5.67
Pelalawan	6.99	4.62	1.28	8.31	7.19	2.03
Siak	29.34	15.19	6.03	5.41	-9.73	1.86
Kampar	17.81	9.15	7.99	8.16	-4.71	2.25
Rokan Hulu	6.26	3.99	2.28	9.99	5.03	3.32
Bengkalis	33.86	15.77	14.32	10.17	-16.02	0.09
Rokan Hilir	24.52	14.31	8.02	9.08	-5.66	1.58
Kepulauan Meranti	10.64	8	6.15	10.55	-2.62	2.61
Pekanbaru	7.46	7.18	2.87	14.19	7.32	4.21
Dumai	0.90	-0.65	8.03	8.38	5.61	5.02
RIAU	18.39	10.84	6.14	8.89	-4.23	2.35

Sumber: BPS Provinsi Riau, 2017

Angkatan kerja di Provinsi Riau pada tahun 2005 berjumlah 2.515.722 orang atau 66,9% dari jumlah penduduk, terdiri atas 52,5% angkatan kerja laki-laki dan 47,5% perempuan. Berdasarkan jumlah penduduk, angkatan kerja Provinsi Riau pada tahun 2007 diperkirakan sekitar 2.008.813 orang. Bagian terbesar penduduk bekerja pada kegiatan pertanian (52,2%) perdagangan, rumah makan, dan hotel (13,7%) jasa-jasa (12,6%) perkebunan (18,5%) perdagangan (17,4%) dan konstruksi (8,1%) Yang terendah adalah lapangan usaha lainnya yang mencatat bagian sebesar 0,1% (RPJP Provinsi Riau, 2005). Tingginya angka migrasi masuk

memberikan implikasi terhadap kesempatan kerja yang semakin terbatas bagi penduduk setempat. Sejalan dengan otonomi daerah, maka peluang bekerja diprioritaskan bagi tenaga kerja tempatan dalam rangka meningkatkan peran serta penduduk setempat dalam pembangunan daerah (RPJP Provinsi Riau, 2005-2020).

Disamping hal tersebut kekayaan sumber daya pesisir dan kelautan juga menjadi penting bagi perkembangan perekonomian pada masa mendatang melalui kegiatan perikanan, wisata bahari, pertambangan dan jasa kelautan seperti kepelabuhanan dan lainnya. Kondisi tersebut dapat ditunjukkan oleh hal-hal sebagai berikut:

(1) Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) tanpa migas yang cukup tinggi yaitu mencapai rata-rata 8,28% per tahun selama periode tahun 2000-2004 dengan laju pertumbuhan yang cukup stabil dan cenderung meningkat (RPJP Provinsi Riau, 2005-2020). LPE dengan migas dengan LPE tanpa migas memiliki kecenderungan yang serupa, namun dengan laju lebih rendah karena laju pertumbuhan sektor pertambangan sangat rendah, yaitu 1,27% per tahun. LPE Provinsi Riau tanpa migas lebih tinggi dibandingkan rata-rata Nasional. Jika pada tahun 2003 LPE Provinsi Riau tercatat sebesar 8,17% tahun 2005 sebesar 8,54% dan tahun 2006 sebesar 8,66%; LPE Nasional mencatat 5,69% pada tahun 2003, 6,48% pada tahun 2005, dan 6,04% pada tahun 2006. (2) Struktur perekonomian dengan migas selama periode 2003-2005 didominasi oleh oleh sektor pertambangan, yaitu rata-

rata sebesar 41-44%, diikuti oleh sektor pertanian sebesar 21,70% dan sektor industry pengolahan sebesar 20,06% pada tahun 2005 (RPJP Provinsi Riau, 2005-2020).

Struktur perekonomian tanpa migas didominasi oleh sektor pertanian, yaitu sebesar 38,17% pada tahun 2005, diikuti oleh sektor industry pengolahan sebesar 31,86% dan sektor perdagangan dan jasa sebesar 11,54%. Sektor pertanian dibentuk oleh sub- sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan peternakan. (3) Pada tahun 2003 PDRB per kapita atas dasar harga konstan tanpa migas tercatat sebesar Rp 6,40 juta, tahun 2004 sebesar Rp 6,83 juta, dan tahun 2006 sebesar Rp 7,60 juta; sedangkan migas pada tahun 2003 tercatat sebesar Rp 16,50 juta, tahun 2004 sebesar Rp 16,64 juta, dan tahun 2006 sebesar Rp 17,50 juta (RPJP Provinsi Riau, 2005-2020).

Realisasi investasi PMDN pada tahun 2006 meningkat hingga lima kali lipat dibandingkan tahun 2005, sedang PMA hingga sepuluh kali lebih besar. Distribusi investasi PMDN menurut Kabupaten/Kota menunjukkan bahwa Kabupaten Kampar, Bengkalis dan Indragiri Hulu merupakan wilayah yang memiliki nilai investasi terbesar. Nilai realisasi PMA terbesar berada pada Kabupaten Bengkalis, Kota Pekanbaru, Kabupaten Siak, dan Kota Dumai. (6) Pembangunan perkebunan selama ini telah meningkatkan pendapatan asli Daerah Riau dan mampu mendorong perkembangan secara lebih luas, seperti Perdagangan, Industri, Jasa, Investasi, dan

membuka kesempatan kerja. (7) Terbukanya pasar domestik dan regional bagi produk hortikultura telah mendorong perkembangan sektor transportasi dan kesempatan usaha lain (RPJP Provinsi Riau, 2005-2020).

#### **2.1.4 Sarana dan Prasarana**

Merupakan perwujudan dari sistem interkoneksi. Dengan demikian, semestinya dilihat sebagai perwujudan dari berbagai ragam interkoneksi, mulai dari yang berupa fisik ekologis yang umumnya bersifat tersedia (*given*), interkoneksi buatan (Interkoneksi teknologi), berupa jaringan Prasarana wilayah seperti jalan, irigasi dan telekomunikasi, dan kemudian memicu atau mendukung mewujudnya interkoneksi yang disebutkan terakhir akan mempengaruhi interkoneksi buatan dan secara langsung maupun tidak langsung, akan memengaruhi pula interkoneksi fisik ekologis. Pola keterkaitan itu berlangsung secara berkesinambungan dan bersifat sangat dinamis (RPJP Provinsi Riau, 2005-2020).

Melihat sarana dan prasarana yang bisa ikut menjadi sumber pendukung infrastruktur dan kemajuan pembangunan atau bahkan sebaliknya bencana ketika tidak memperhatikan dalam penggunaan sarana dan prasarana dengan baik dan tidak mempertimbangan ekosistem, karena hal ini merupakan dampak yang dirasakan langsung akibat kebakaran hutan dan lahan, yaitu bencana asap. Serta dapat menimbulkan masalah kesehatan seperti iritasi mata, hidung, tenggorokan, reaksi alergi, peradangan dan infeksi. Memperburuk penyakit asma dan penyakit paru kronis lain, seperti

bronkhitis kronis. Kemampuan kerja paru dalam menyuplai oksigen berkurang, mudah lelah dan sulit bernafas. Bagi yang berusia lanjut, anak-anak, penderita sakit kronis, ibu hamil akan lebih rentan mengalami gangguan kesehatan. Kemampuan paru mengatasi infeksi berkurang, hingga rentan terkena penyakit. Memperburuk kondisi penyakit kronis sebelumnya.

### **2.1.5 Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang**

Pola dan struktur ruang Provinsi Riau menentukan kualitas interkoneksi antar daerah dan antar kawasan, sekaligus merupakan suatu komunitas yang utuh yang memungkinkan Riau berartikulasi secara optimal terhadap dinamika lingkungan eksternalnya. Struktur dimaksud terdiri atas jaringan transportasi, jaringan irigasi dan air baku, jaringan energy (listrik), serta jaringan telekomunikasi. Sedangkan Pola dimaksud terdiri dari kawasan lindung dan budidaya. Provinsi Riau sangat diharapkan akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Wilayah Barat Indonesia, yang membuka jalan baik untuk pembangunan wilayah maupun ruang. Pengembangan sumberdaya di Provinsi Riau didasarkan pada berbagai isu yang perlu ditangani secara terpadu berdasarkan potensi dan kondisi wilayah yang didasarkan pada sumberdaya alam perlu lebih dipromosikan demi perluasan ekonomi, peningkatan pendapatan penduduk dan pengentasan kemiskinan (RPJP Provinsi Riau, 2005-2020).

Potensi wilayah Riau yang terletak di Koridor Selata Malaka di Kawasan Sumatera membuka peluang Riau agar dapat memainkan

perannya secara maksimal sebagai pusat pemasok sumberdaya dan berfungsi sebagai pusat pengolahan dan perdagangan untuk industri-industri berbasis sumberdaya. Tata Ruang Wilayah Riau mengharuskan terciptanya pengolahan kawasan lindung yang mantap sehingga fungsi lindungnya dapat optimal. Berdasarkan Perda No. 10 tahun 1994 kawasan lindung dialokasikan seluas 1.876.223 Ha atau 21.20% dari luas Provinsi Riau. Adanya pengolahan dan pengembangan kawasan budi daya yang diarahkan dapat mengakomodasi kebutuhan pengembangan seluruh sektor pembangunan yang potensial secara optimal dalam beberapa kawasan andalan (RPJP Provinsi Riau, 2005-2020).

Terciptanya sistem pusat pemukiman di setiap kawasan andalan yang berfungsi sebagai pusat pelayanan daerah hinterlandnya. Terciptanya sistem prasarana wilayah terpadu yang dapat mendukung pengembangan sektor ekonomi dan sosial masyarakat. Tersedianya kebijaksanaan pembangunan yang menyangkut tata guna tanah, tata guna air, dan tata guna sumber daya alam serta kebijaksanaan penunjang pemanfaatan ruang lainnya.

#### **2.1.6 Pemerintahan dan Politik**

Pelaksanaan pemerintahan daerah seharusnya berbasis pada identitas daerah yang merupakan modal spiritual (modal utama) dari suatu pembentukan tatanan. Modal lainnya adalah modal sosial (Interkoneksi) dan modal fisik (antara lain berupa ketersediaan sumberdaya alam dan

lingkungan yang sehat) pendekatan perencanaan pembangunan daerah secara berkesinambungan dan berkelanjutan, konsisten pada dokumen perencanaan, selama ini tidak dilaksanakan sepenuhnya. Ada beberapa hal yang menjadi penyebabnya. Pertama, Penyelenggaraan program pembangunan hampir tidak pernah mengacu kepada nilai-nilai dasar yang dicantumkan pada dokumen perencanaan tersebut, karena pembangunan lebih diartikan sebagai kegiatan fisik untuk mencapai sasaran-sasaran yang bersifat fisik pula, bukan pembangunan manusia (dalam arti sebenarnya) dan kelembagaannya yang lebih berdimensi budaya (RPJP Provinsi Riau, 2005-2020). Sudah menjadi fakta bahwasanya kegiatan mitigasi merupakan bukan hal urgent dalam sistem pemerintahan, yang di kesampingkan karena di anggap hal yang tidak bisa di duga bencana alam atau non alam (bencana yang disebabkan ulah manusia) yang terjadi. Pada hal bencana bisa saja di sebabkan oleh manusia yang lupa akan menjaga lingkungan agar tetap terjaga dengan seimbang dengan sebagaimana mestinya (alam).

Pendekatan pembangunan berbasis identitas sudah asing lagi para perencana, pembangunan lebih banyak dimengerti sebagai pembangunan fisik yang bebas nilai, sehingga tidak perlu dikaitkan dengan budaya. Kedua, keterbatasan wawasan para perencana pada khususnya dan aparat pemerintah melihat pembangunan sebagai kegiatan fisik untuk mencapai tujuan yang pada umumnya berdimensi fisik pula. Laju perubahan dalam sistem perencanaan yang relatif sangat cepat (terutama dalam era reformasi) membuat aparat belum mampu menyesuaikan diri, disamping itu sistem

perencanaan yang diketengahkan belum sepenuhnya bebas dari cacat (metodologis, hokum dan lainnya). Ketiga, budaya dan kearifan lokal telah terkikis oleh kehidupan masyarakat yang hampir melupakan nilai-nilai budayanya secara murni, menggeser pemahaman nilai religious menjadi matrialistis (RPJP Provinsi Riau, 2005-2020). Sehingga dampak buruk dalam kasus bencana yang setiap tahun terjadi bencana asap akibat pembukaan lahan secara-secara besar-besaran tanpa memikirkan kestabilan lingkungan.

Kehidupan sehari-hari masyarakat hampir tidak dinafasi lagi oleh spirit budayanya. Identitas komunitas (termasuk identitas lembaga-lembaga) kemasyarakatan tradisional pada dasarnya tidak kuat. Keempat, persepsi masyarakat dan kalangan aparat pemerintah yang belum sepenuhnya benar tentang fungsi dari identitas daerah. Hal tersebut terutama disebabkan oleh karena pola pengolahan pemerintah dan pembangunan yang berbasis identitas masih relatif baru, di bidang politik, kecenderungan yang sama juga terjadi.

Lembaga-lembaga politik dalam bentuk partai politik berkembang sangat pesat dilihat dari sisi jumlah. Hampir semua partai politik memiliki perwakilan di tingkat provinsi dan mayoritas kabupaten. Walaupun, ada kecenderungan bahwa partai-partai tersebut belum mampu menghimpun dan menyalurkan aspirasi masyarakat secara optimal terutama dalam mitigasi bencana, karena belum dilaksanakan pendidikan politik secara baik, apalagi menumbuhkan budaya politik yang demokratis sesuai nilai-nilai Budaya



Lokal (RPJP Provinsi Riau, 2005-2020). Organisasi sosial politik belum mampu memberikan suasana yang kondusif dan cenderung memecah belah kekerabatan yang ada dimasyarakat, namun fenomena ini merupakan suatu proses pendewasaan berpolitik masyarakat bahwa harus di sadari bukan waktunya lagi mengedepankan ego dalam mengambil kebijakan.

Kelembagaan daerah yang berwujud dalam struktur organisasi, masih belum menganut prinsip efisiensi dan efektivitas sehingga dalam operasionalnya, aparatur cenderung tidak mampu transparan dan akuntabel dalam pelayanannya. Hal ini seiring dengan tingkat kualitas aparatur pemerintah daerah yang masih harus digenjot untuk dapat bekerja secara professional. Kaitan lainnya karena rekrutmen dan penempatan jabatan struktural belum sepenuhnya berdasarkan pada kompetensi seseorang. Bisa dilihat bagaimana penanganan atau dampak menurunnya kualitas udara di Provinsi Riau tersebut ini disebabkan kebakaran hutan dan kebakaran lahan. Selain itu pencemaran udara yang diakibatkan kebakaran hutan dapat menimbulkan bau, gangguan penglihatan dan dapat menimbulkan hujan asam yang merusak lingkungan. Bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau Indonesia terjadi dalam beberapa tahun sebelumnya sampai dampak ekstremanya bisa dirasakan hingga saat ini dan implikasi dari bencana tersebut telah banyak menimbulkan kerugian baik dari sektor, perekonomian, kesehatan, lingkungan dan hubungan dengan Malaysia, Singapura dan negara ASEAN lainnya.

## **2.2 PERMASALAHAN BENCANA ASAP AKIBAT KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI PROVINSI RIAU**

Provinsi Riau memiliki hutan dan lahan yang sangat potensial untuk pengembangan sektor-sektor perkebunan, pertanian, pemukiman dan kehutanan. Kawasan Suaka Alam: 633.420 Ha; Kawasan Hutan Lindung : 234.015 Ha; Kawasan Hutan Produksi Terbatas : 1.031.600; Kawasan Hutan Produksi Tetap : 2.331.891; dan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi : 1.268.767. (Sumber: Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No: SK. 878/MENHUT-II/2014 tanggal 29-09-2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau).

Riau terletak di garis ekuator/khatulistiwa yang mempunyai iklim tipe ekuatorial dan mengalami dua puncak musim yaitu hujan pada bulan Maret dan April serta kemarau pada bulan Mei-September sehingga potensi rawan kebakaran akan terjadi pada musim kemarau dan transisi. Pada bulan November-April, pola angin bergerak dari arah timur laut menuju ke barat daya dan selatan sehingga bila terjadi kebakaran hutan dan lahan akan berdampak kabut asap di wilayah Provinsi Riau dan Sumatera Barat sedangkan pada bulan Mei-September pola angin bergerak dari Sumatera Barat sampai dengan Jambi ke arah timur laut dan utara sehingga bila terjadi kebakaran di wilayah Riau maka akan berdampak kabut asap ke negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia (Pergub No 61 Tahun 2015 Tentang Pengendalian KARHUTLA).

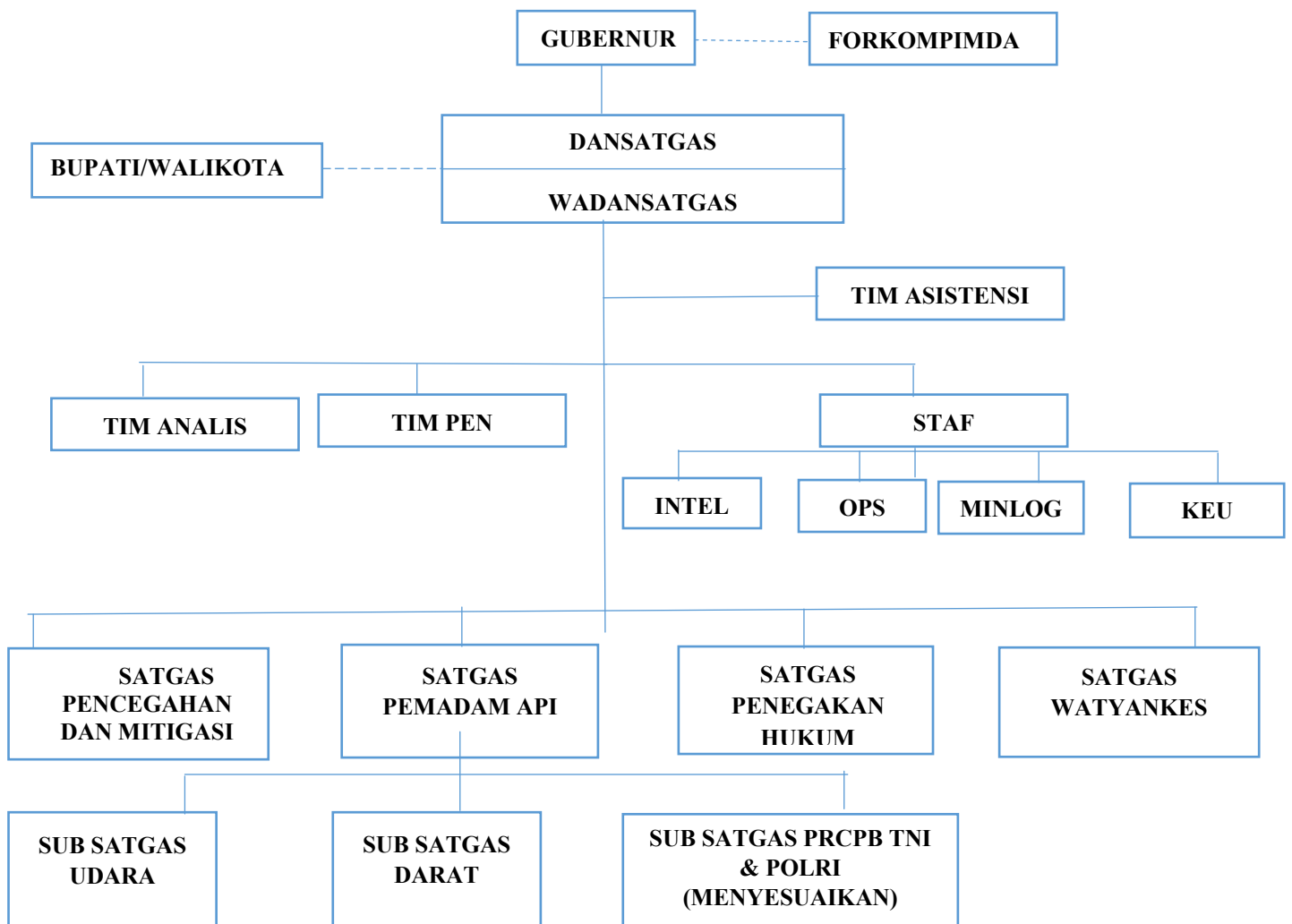
## 2.2 SATUAN TUGAS ORGANISASI PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN PROVINSI RIAU

### 2.2.1 Bagan Struktur Organisasi PUSDAKARHUTLA Tahun 2015

- a. Bagan Struktur Organisasi Pra Bencana.

Bagan Struktur Organisasi tingkat Provinsi, mengacu kepada Struktur Organisasi Pusdalkarhutla (Peraturan Gubernur Riau No. 17/II/2014).

- b. Bagan Struktur Organisasi Saat Bencana Tingkat Provinsi sebagai berikut:



## **2.2.2 Deskripsi Struktur Tingkat Provinsi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan-Bencana Asap.**

- A.** Penanggung Jawab : Gubernur.
- B.** Penasehat : Forkompimda.
- C.** Dansatgas : Pejabat yang ditunjuk.
- D.** Wadansatgas : Pejabat yang ditunjuk.
- E.** Tim Asistensi Transparansi & Tertib Administrasi Keuangan : Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Inspektorat Provinsi Riau.
- F.** Staf Satgas.  
Seksi Intelijen Pejabat yang ditunjuk, Seksi Operasi Pejabat yang ditunjuk, Seksi Administrasi dan Logistik Pejabat yang ditunjuk, Seksi Keuangan Pejabat yang ditunjuk.
- G.** Tim Analisis.  
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Pertanahan Nasional (BPN), Badan Lingkungan Hidup (BLH), Dinas Kehutanan, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam, Dinas Perkebunan, Dinas Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau, Pusat Pengelolaan Ekoregion (PPE).
- H.** Tim Penerangan.  
Dinas Komunikasi dan Informasi, Biro Humas Pemda, Penrem 031/WB, Bidang Humas Polri, Pentak Lanud RSN, BPBD Provinsi Riau, Organisasi Wartawan yang terakreditasi.

## I. Unsur Pelaksana.

- 1) Satgas Pencegahan dan Mitigasi: Bappeda, BLH, Dinas Cipta Karya, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, TNI/POLRI, BPBD, Perguruan Tinggi, Perusahaan.
- 2) Satgas Pemadam Api
  - ) Sub Satgas Darat: Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Badan SAR Nasional (BASARNAS), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP), Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA/Manggala Agni), Badan Lingkungan Hidup (BLH), Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Pemadam Kebakaran (PMK), Perusahaan, Taruna Siaga Bencana (Tagana), Masyarakat Peduli Api (MPA), Pramuka.
  - ) Sub Satgas Udara: Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU), Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Badan Search and Rescue Nasional (BASARNAS), Potensi Dirgantara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah
  - ) Sub Satgas Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (PRCPB) TNI & POLRI (Saat status siaga darurat atau peralihan ke pemulihan dapat ditiadakan, saat status tanggap darurat dapat diaktivasi, disesuaikan kebutuhan): 2 Batalyon TNI AD, 1 Batalyon Marinir TNI AL, 1 Batalyon Paskhas TNI AU, 1 Batalyon Brimob.

- 3) Satgas Penegakan Hukum
  - ) Sub Satgas Lidik/Sidik: Kepolisian Republik Indonesia POLRI, Polisi Militer (POM TN), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Biro Hukum, Polisi Kehutanan.
  - ) Sub Satgas Penuntutan: Kejaksaan.
- 4) Satgas Perawatan & Pelayanan Kesehatan: Diskes Provinsi Riau, Kes Rem 031/WB, Bid Dokkes Polda Riau, Dinsos Provinsi Riau, Kantor Kesehatan Pelabuhan, Rumkit Lanud RSN, Palang Merah Indonesia (PMI), Kwarda 04 Riau, Perusahaan/Swasta

### **2.2.3 Tugas dan Tanggung jawab**

#### **a. Pra Bencana**

- 1) Masing-masing SKPD tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota dan instansi terkait melaksanakan tugas dan fungsi sesuai bidangnya.
- 2) Pada tahap pra bencana uraian pelaksanaan tugas sudah terurai dari mulai tahap mitigasi sampai dengan tahap kesiapsiagaan.

#### **b. Saat Bencana**

Tingkat Provinsi, Penanggung Jawab Operasi Tanggap Darurat dijabat oleh Gubernur dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut Memberikan petunjuk dalam pelaksanaan pengendalian bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Memberikan arahan kepada Kepala BPBD agar melakukan koordinasi, kerjasama dan membentuk Satgas pengendalian bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan di wilayah yang terkena bencana. Forkompimda Provinsi membantu

dan memberikan saran kepada Gubernur serta melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait sesuai tugas dan fungsinya dalam pengendalian bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan.

Bupati/Walikota mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: (1) Mengeluarkan surat keputusan tentang status bencana berdasarkan rapat koordinasi dengan Forkompimda dan dilaporkan kepada Gubernur. (2) Melaksanakan koordinasi dengan Dansatgas Operasi Tanggap Darurat tentang pengendalian bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan. (3) Memimpin dan mengendalikan pejabat Pemda dibawah jajarannya serta mendukung pelaksanaan tugas Satgas Operasi Tanggap Darurat di dalam pengendalian bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan.

## **2.3 Tahapan Pengendalian Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan Dan Lahan**

### **2.3.1 Pra Bencana**

- 1) Pencegahan dan Mitigasi:
  - a) Mengoptimalkan perangkat desa dalam melaksanakan antisipasi kebakaran hutan dan lahan dari tingkat desa sampai tingkat Kabupaten/Kota oleh Kepala Desa, Camat dan Bupati/Walikota.
  - b) Melakukan pengecekan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan seperti jalan, jembatan, sungai, kanal, embung, sekat bakar jalur kuning dan sekat bakar

jalur hijau oleh instansi terkait, Aparat desa sampai dengan tingkat Kabupaten.

- c) Pengaktifan peralatan pemadaman yang dimiliki pada setiap tingkatan, termasuk Manggala Agni, Tim Reaksi Cepat, Regu Pemadam Kebakaran (Regdam) di SKPD maupun RPK Perusahaan.
- d) Update informasi/revisi terhadap peta rawan kebakaran, yang dimiliki masing-masing sektor (Lingkungan Hidup, BMKG, Kehutanan).
- e) Membentuk pos terpadu di masing-masing daerah yang rawan kebakaran yang unsurnya terdiri dari Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Manggala Agni dan Masyarakat Peduli Api (MPA), Regu Pemadam Kebakaran (regdam), Tim Reaksi Cepat Satpol PP dengan menutup akses jalan/kanal ke kawasan konservasi/hutan lindung dan memasang tanda larangan masuk ke kawasan tersebut.
- f) Membuat Blocking parit-parit alam didaerah rawan karhutla untuk menjaga ketersediaan air pada musim kemarau guna memudahkan usaha pemadaman dini kebakaran dilapangan.
- g) Penyediaan peralatan komunikasi dalam penerimaan dan penyebarluasan informasi tentang kebakaran (termasuk hot spot) seperti handy talky, internet, telepon dan mesin faximile.



- h) Melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi mulai tingkat desa sampai dengan tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota tentang pencegahan kebakaran hutan dan lahan oleh Instansi terkait dibawah koordinasi BPBD Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- i) Melakukan monitoring/patroli darat dan udara di daerah-daerah rawan kebakaran hutan dan lahan oleh Pusdalkarhutla BPBD Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- j) Melakukan kegiatan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku pembakar, perambah hutan dan lahan serta illegal logging.
- k) Melakukan penertiban terhadap SKT yang telah diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah.
- l) Koordinasi dengan dinas/instansi teknis dalam kesiapsiagaan peralatan, sumber daya manusia dan anggaran.
- m) Melaksanakan kampanye kesehatan di seluruh wilayah kerja.
- n) Membuat peta geomedik daerah rawan bencana disetiap Kabupaten/Kota.
- o) Melakukan monitoring/patroli darat dan udara di daerah-daerah rawan kebakaran oleh Pusdalkarhutla BPBD Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- p) Menyusun dan menyebarluaskan pedoman/protap penanggulangan bencana.

- q) Inventarisasi sumber daya kesehatan/pemerintah dan swasta termasuk LSM.
- r) Membentuk dan mengembangkan tim reaksi cepat.
- s) Melakukan kegiatan penyelidikan dan penegakan hukum terhadap pelaku perambah hutan dan lahan secara ilegal.
- t) Membentuk pusat data dan informasi penanggulangan bencana disetiap Kabupaten/Kota.
- u) Melengkapi sarana/fasilitas yang diperlukan termasuk mengembangkan system komunikasi dan informasi di Kabupaten/Kota.
- v) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penanggulangan kesiapsiagaan bencana
- w) Mengadakan koordinasi lintas program dan lintas sektor yang meliputi sinkronisasi kegiatan penanggulangan bencana dengan pusat dan Kabupaten/Kota.